



## INSTITUSI PENDIDIKAN KRISTEN SEBAGAI PILAR KEMERDEKAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Jannes Eduard Sirait, Leorince Leorince  
STT Bethel Indonesia Jakarta  
Jannes.sirait@sttbi.ac.id

### *Abstract*

*Educational freedom in Indonesia faces significant challenges, including commercialization of education, unequal access, low quality of human resources, corruption, and economic conditions that limit access to quality education. Christian educational institutions play an essential role in realizing equal access and quality of education for all levels of society, regardless of social or economic background. Despite policies such as free education and infrastructure improvements, inequality remains a significant obstacle that has yet to be fully resolved. Strengthening collaboration between the government, church, and society is needed to overcome these obstacles, including strengthening Christian educational institutions' capacity, developing alternative education, and providing more inclusive financial support. These steps are expected to create a fair and equitable educational environment, allowing everyone to access quality education as a foundation for more inclusive and sustainable national development.*

**Keywords:** *Educational Freedom; Equality of Access; Commercialization of Education; Christian Educational Institutions; Quality of Human Resources*

### **Abstrak**

Kemerdekaan pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, termasuk komersialisasi pendidikan, ketidakmerataan akses, kualitas sumber daya manusia yang rendah, korupsi, dan kondisi ekonomi masyarakat yang membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas. Institusi pendidikan Kristen berperan penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Meskipun terdapat kebijakan seperti pendidikan gratis dan peningkatan infrastruktur, ketidakmerataan masih menjadi kendala utama yang belum sepenuhnya teratasi. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini, termasuk melalui penguatan kapasitas institusi pendidikan Kristen, pengembangan pendidikan alternatif, serta dukungan finansial yang lebih inklusif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata, memungkinkan setiap personal untuk mengakses pendidikan berkualitas sebagai fondasi untuk pembangunan bangsa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kemerdekaan Pendidikan; Kesetaraan Akses; Komersialisasi Pendidikan; Institusi Pendidikan Kristen; Kualitas Sumber Daya Manusia

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan pendidikan adalah menggali peran dan tantangan dalam mengejar kemerdekaan pendidikan pada lingkungan institusi pendidikan Kristen. Maka, tulisan ini bermaksud mengeksplorasi Bagaimana institusi pendidikan Kristen dapat menjadi wahana untuk mewujudkan kemerdekaan pendidikan. Menyoroti pentingnya kesetaraan atau kemerdekaan akses pendidikan tanpa memandang latar belakang status sosial. Memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses secara merata oleh semua orang. Masalah utama dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Indonesia belum mampu mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat (Safarah and Wibowo 2018, 207). Kemerdekaan pendidikan pada hakikatnya mengisyaratkan makna bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama dalam pendidikan. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terpinggir, masih kesulitan untuk mengakses Pendidikan

(Wahyaningsih 2018, hlm. 8) sehingga pendidikan bermutu menjadi modal investasi yang tidak murah dan tidak mudah didapatkan.

Kemerdekaan pendidikan, pada hakikatnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah wajib menanggung menanggung biaya pendidikan. Undang-undang juga menjamin dan menegaskan bahwa semua anak Indonesia yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk masuk sekolah. Tidak boleh ada diskriminasi bagi setiap golongan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, baik bagi anak laki-laki dan perempuan. Undang-Undang No. 4/1950 mencatat posisi pemerintah perihal pendidikan warga negara. Kemudian Undang-Undang No. 2/1989 pada pasal 36, yaitu: penegasan tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pendanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor prinsipil dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, setiap orang dapat memperoleh kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, moralitas yang baik, integritas yang tinggi, dan keimanan (Angga, Abidin, and

Iskandar 2022). Artinya, bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya saing negara serta berperan sebagai instrumen utama dalam mengatasi dan mengakhiri kemiskinan (Wijadno 2018, hlm. 1). Wajah bangsa sendiri pun tercermin dari bagaimana model dan kondisi pendidikannya. Artinya, jika ingin tahu peradaban dan kualitas suatu bangsa maka perhatikan dan tengoklah kondisi pendidikannya. Pendidikan merupakan opsi terdepan dalam menemukan solusi bagi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat (Pantan et al. 2021). Melalui pendidikan, kita dapat merefleksikan kembali makna dari interaksi antar kelas sosial dalam masyarakat. Namun, faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak dapat memiliki akses untuk pendidikan dan masih banyak masyarakat yang belum melek huruf sekalipun pemerintah telah memfasilitasi dengan menyelenggarakan program pendidikan gratis, walaupun itu bukan diperuntukkan untuk sekolah-sekolah swasta.

Pendidikan pada esensi perannya adalah mempersiapkan setiap orang agar mampu mandiri dan

memiliki keberhasilan dalam hidup serta masa depan sebagai anak bangsa yang beradap (Maulana 2022). Sejarah mencatat bahwa pada era kepemimpinan, pada masa Soekarno, pemerintah mencanangkan pendidikan pemberantasan buta huruf karena pada masa itu masyarakat Indonesia banyak yang buta huruf. Kemudian di era Soeharto, program pemberantasan buta huruf dilanjutkan dan mengejar ketertinggalan, maka dilakukan pembangunan pendidikan melalui pembukaan sekolah-sekolah dasar hingga ke pelosok negeri yang dikenal dengan SD Inpres. Pada era berikutnya, pemerintah melahirkan kebijakan dan pelaksanaan program pendidikan sembilan tahun, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada era reformasi, pemerintah melakukan perbaikan mulai dari membenahan sistem hingga program pendidikan gratis bagi sekolah negeri hingga tingkat lanjutan atas (SLTA).

Perlu diakui bahwa pendidikan gratis tersebut merupakan pintu masuk untuk kemerdekaan pendidikan di Indonesia (Safarah and

Wibowo 2018) Namun secara faktual, tindakan perbaikan sistem dan program pendidikan gratis tersebut ternyata tidak serta merta membuat seluruh warga masyarakat memiliki akses untuk mengikuti pendidikan. Pemicu utamanya, fasilitas masih kurang, pembelajaran kurang layak, sumber daya pendidik tidak memadai dan akses ke sekolah sangat sulit. Pada sisi lain, sekalipun biaya pendidikan diberikan secara gratis, namun masyarakat ternyata tidak memiliki biaya untuk memenuhi perlengkapan-perengkapan sekolah yang diperlukan sehingga tidak sedikit warga yang mengalami putus sekolah. Mereka terkendala dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga masyarakat kurang antusias dan kurang peduli dengan pendidikan. Keterbatasan ekonomi membuat mereka lebih memilih meninggalkan sekolah dan bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Thomy A. Atmaja dan tim mengatakan bahwa penyebabnya yaitu kondisi anak dan kepedulian orangtua (Kristia Trikurnianto Pandu, Aminuyati 2022).

Pemerintah dalam undang-undang memberi jaminan pendidikan yang berkualitas terwujud dengan baik tanpa diskriminasi sebab setiap penduduk negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun secara faktual tetap memperlihatkan perlakuan diskriminatif dan kemerdekaan pendidikan masih kurang atau hampir punah. Persoalan utama dalam perwujudan kemerdekaan pendidikan ternyata berada pada sistem yang sangat tidak adil. Sekolah negeri yang dianggap favorit menjadi milik segelintir orang. Sehingga orang yang tidak memiliki biaya untuk belajar sudah kalah sebelum melangkah. Maka perlu ada perubahan signifikan dan melalui perubahan tersebut dapat memberi harapan kepada yang membutuhkan pertolongan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan pada sistem atau kebijakan yang tidak adil supaya menjadi lebih adil dan memihak kepada mereka yang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Namun perubahan tersebut dapat terjadi jika dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana diungkapkan Ki Darmaningtyas: perubahan kebijakan

hanya terjadi melalui suatu gerakan kolektif, bersama dengan *multi-stakeholder* (guru, murid, orang tua, swasta, LSM, organisasi rakyat, dan partai politik (Darmaningtyas 2022, 398).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang amat besar dan jumlah tersebut secara otomatis tentu berandil besar terhadap perkembangan jumlah anak sekolah, mulai dari tahap pendidikan dasar hingga tingkat lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tersebut tentu merupakan kuantiti yang fantastis dan sangat signifikan. Pada nyatanya, tidak semua warga negara mendapat akses terhadap pendidikan yang tersedia. Maka, masalah kesetaraan atau kemerdekaan dalam pendidikan menjadi isu yang kompleks. Tidak mengherankan jika hak dasar sebagian besar warga negara untuk mendapatkan pendidikan masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kondisi ini menjadi pertarungan personal yang berada di bawah ambang kefakiran. Meskipun undang-undang menjamin kesetaraan atau kemerdekaan hak dalam mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, kenyataannya berbeda, seperti yang terlihat dari banyaknya

personal yang tidak dapat mengakses pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan adalah hasil dari berbagai kekacauan dalam sistem pendidikan, menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan pendidikan belum tercapai.

Kondisi ekonomi yang memperhatikan ditambah dengan komersialisasi dan kapitalisme dalam dunia pendidikan menyebabkan semakin banyak kalangan kesulitan untuk mengakses pendidikan. Pemerintah perlu merespons dengan cepat dan berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi beban bagi rakyat miskin. Menurut UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan. Namun, realisasi hak-hak dasar tersebut masih jauh dari memuaskan, hanya terdengar dalam retorika belaka. Kampanye pendidikan murah sampai gratis yang disampaikan para anggota dewan legislatif, capres-cawapres, dan juru kampanye hanyalah janji ataupun sebatas *lips-service* demi menarik simpati. Kekurangan finansial telah menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Pada saat sekarang pemerintah dalam menangani pendidikan sedikit membaik walaupun terbatas. Namun perlu sistem yang lebih baik untuk menghilangkan kesan mengenai pergantian penguasa turut mendorong dan memicu terjadinya pergantian berbagai kebijakan pendidikan, dan selalu terjadi. Pada hal, sistem pendidikan tidak bisa diubah-ubah dengan sikap ambisius dan memaksa untuk segera berubah hanya dalam beberapa tahun sebab kekurangan dan kelebihanannya belum terlihat. Melakukan perubahan dalam dunia pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, perlu partisipasi dan usaha nyata dari masyarakat, serta dukungan penuh dari semua pihak.

Setiap waktu, lembaga pendidikan bersaing dalam meningkatkan biaya pendidikan, yang menyulitkan akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah. Sektor pendidikan telah beralih menjadi tempat mencari untung daripada tempat pembelajaran. Perubahan ini menyebabkan hanya sebagian kecil orang yang bisa mengakses sekolah mahal. Menurut UNESCO 2019,

hampir 60 juta anak di seluruh dunia tidak dapat membaca atau menulis, dengan alasan utamanya adalah masalah ekonomi. Di Indonesia, masih ada sekitar 26,16 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan menurut BPS pada Maret 2022. Kemiskinan menjadi hambatan utama bagi pendidikan, mengurangi minat anak-anak untuk bersekolah dan menimbulkan kesulitan bagi orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Dampaknya terasa pada meningkatnya jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, terutama di jenjang Sekolah Dasar, seperti yang dilaporkan oleh Kemendikbudristek pada Mei 2022. Ini mengakibatkan masa yang kelam bagi anak-anak dan merusak penerus masa depan dengan mengurangi rasa percaya diri, membatasi pergaulan, dan menyebabkan kemalasan serta perilaku amoral. Maka, tidaklah mengejutkan bila anak-anak di bawah umur terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral dan perusakan.

Fenomena ketidakmampuan sebagian warga negara untuk mengakses pendidikan dan memperoleh kesetaraan atau

kemerdekaan menghasilkan beragam respons. Beberapa diantaranya menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap pendidikan, sementara pada pihak lain sangat ambisius. Fakta memperlihatkan bahwa masyarakat kaya cenderung memilih sekolah negeri favorit atau sekolah swasta yang mahal dan ternama karena dianggap berkualitas tinggi. Namun, di balik sikap ambisius tersebut, terdapat kalangan anak-anak yang tidak memiliki keinginan untuk sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang tinggal di bawah garis kemiskinan memiliki keinginan besar untuk sekolah tetapi terbentur oleh biaya pendidikan yang mahal. Akhirnya, memilih sekolah swasta yang murah, meskipun standar biaya tetap tinggi bagi mereka. Ada yang memilih sekolah negeri kategori mutu rendah dan terjangkau. Namun, terdapat juga kelompok masyarakat yang sama sekali tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, menyebabkan lahirnya masyarakat buta huruf. Pemerintah perlu merespons dan mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan supaya setiap orang dapat mengalami kemerdekaan pendidikan. Gereja dan institusi pendidikan Kristen harus peka terhadap kemerdekaan

pendidikan, mengingat bahwa dalam komunitas Kristen juga sangat banyak yang kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Pada dasarnya, penyelia dan pengelola pendidikan cenderung melakukan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi tersebut membuat pendidikan menjadi sangat mahal. Kesannya adalah memperdagangkan pendidikan untuk memperoleh keuntungan besar. Pendidikan sebagai komoditas telah dikuasai pihak kapitalis dan menjadi fenomena yang sulit dihindari. Mengingat tingginya nilai ekonomi pendidikan, wajar bila sektor swasta pun tertarik dan berinvestasi di dalamnya. Meskipun pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor swasta juga mengambil peran besar. Memperlihatkan bahwa pemerintah dan rakyat (pihak swasta) pun melakukan inisiatifnya sendiri-sendiri. Menegaskan bahwa pendidikan benar-benar menjadi barang dagangan kapitalisme dan menggeliatnya bisnis pendidikan karena menjadi komoditi perdagangan yang seksi.

Pendidikan bukan komoditas karena merupakan investasi utama bagi masa depan bangsa. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan telah menjadi bisnis yang mendukung ketidaksetaraan. Sekolah dengan mutu tinggi menjadi milik golongan tertentu, menyebabkan golongan bawah sulit mengaksesnya. Terjadinya kompetisi pada kalangan lembaga pendidikan untuk pendidikan mahal, melegitimasi sekolah mengutamakan status sosial. Meskipun pada awalnya, tampaknya mengurangi beban pemerintah, namun dengan banyaknya masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan mahal. Sehingga prioritas pemerintah dalam membangun sistem pendidikan untuk kemajuan masyarakat pun dipertanyakan. Proyek komersialisasi pendidikan menjadi masalah moral dan menghalangi kemerdekaan pendidikan. Komersialisasi pendidikan adalah perbuatan tercela, berlawanan dengan etika dan budaya pengembangan sumber daya manusia, puncaknya adalah pergeseran yang baik menjadi buruk.

Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa studi yang

signifikan, seperti yang telah dilaksanakan oleh Hafid Rustiawan, membahas tentang komersialisasi pendidikan. Ada beberapa faktor di balik fenomena ini, termasuk pengaruh ideologi kapitalisme dan liberalisme, perubahan dalam pemikiran tentang sumber daya manusia, dan peningkatan otonomi lembaga pendidikan dalam mengelola pembiayaan, yang membuka peluang bagi pemanfaatan dana demi keuntungan semata. (Rustiawan 2021) Iskandar Fellang juga meneliti tentang liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, yang sebagai respons terhadap dinamika globalisasi, membuka jalan bagi institusi pendidikan untuk menjadikannya sebagai barang dagangan guna mencari keuntungan finansial (Fellang 2022). Rida Fironika K menyimpulkan bahwa pendidikan bermutu memerlukan biaya besar, terutama di Indonesia, di mana harga pendidikan tinggi, khususnya jika dibandingkan dengan penghasilan yang biasa diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan kurang dari yang dibutuhkan (Fironika K 2015). Sementara itu, penelitian Rustan Efendy mengenai kesetaraan gender

dalam pendidikan menyimpulkan perlunya menciptakan peluang dan mengembangkan program kesetaraan gender dan hak Pendidikan (Effendy 2014).

Belum ada kajian khusus yang mengulas tentang diskursus kemerdekaan pendidikan dalam institusi pendidikan Kristen di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan hak dan kesejahteraan masyarakat dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan realisasi kemerdekaan pendidikan di lingkungan institusi pendidikan Kristen. Dengan demikian, institusi pendidikan Kristen dapat menjadi tempat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan. Ini menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap topik ini dan bertujuan untuk menyampaikan hasil pemikiran mengenai kemerdekaan atau kesetaraan pendidikan dalam konteks institusi pendidikan Kristen di Indonesia.

Komersialisasi pendidikan menjadi penyebab matinya kemerdekaan pendidikan dan menciptakan jurang kesenjangan

yang signifikan. Konsep modernisasi yang diadopsi secara tidak langsung ikut mendorong perkembangan lembaga pendidikan alternatif. Anggaran pendidikan yang mahal menjadi pemisah kualitas di antara lembaga pendidikan, sehingga beberapa institusi bahkan tutup karena masyarakat beralih ke sekolah yang dianggap lebih berkualitas meskipun harganya lebih tinggi. Darmaningtyas mengatakan: Diskriminasi dalam perencanaan dan alokasi anggaran justru bisa memperbesar kesenjangan mutu antara sekolah negeri yang terkemuka dengan sekolah swasta atau negeri di wilayah yang kurang mendapat perhatian dengan sekolah swasta yang berada di pinggiran. Dampaknya lebih jauh adalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Sekolah-sekolah Kristen pun turut serta memasang tarif mahal dan menjadi pendidikan sebagai *bisnis oriented* walaupun masih dijumpai segelintir lembaga pendidikan Kristen yang non-profit. Kondisi ini menjadikan kemerdekaan dalam pendidikan sangat sulit untuk didapatkan, terutama akses pada pendidikan berkualitas. Institusi dan

yayasan pendidikan Kristen kelihatannya telah turut serta meramaikan ketidaksetaraan pendidikan dengan pola hukum rimba dan komersialisasi. Komersialisasi pendidikan dalam institusi Kristen menambah kejamnya keterjajahan pendidikan. Institusi pendidikan Kristen terjebak dalam umpan pancing modernisasi, turut serta menciptakan jurang kesempatan untuk pendidikan pada kalangan kaya dengan mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Studi ini berfokus pada diskursus kesetaraan atau kemerdekaan dalam konteks pendidikan, menjadi sebuah perenungan mendalam yang melibatkan landasan filosofis teologis Kristen. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, riset ini memanfaatkan berbagai literatur terkait kesetaraan atau kemerdekaan dan keadilan dalam pendidikan. Proses studi literatur dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan informasi dari beragam referensi yang berhubungan seperti publikasi jurnal, buku, majalah, serta internet. Dengan pendekatan holistik terhadap

tema ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan baru tentang kemerdekaan pendidikan. Peneliti menelusuri pemikiran yang mendasari prinsip-prinsip kemerdekaan pendidikan dalam institusi pendidikan Kristen, serta dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam konteks pendidikan Kristen kontemporer.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Diskursus Kemerdekaan Pendidikan di Indonesia**

Diskursus tentang kemerdekaan pendidikan melibatkan berbagai pandangan tentang akses pendidikan yang merata dan inklusif. Ini meliputi evaluasi sistem pendidikan, identifikasi hambatan dan langkah-langkah perbaikan. Pemikiran tentang kemerdekaan pendidikan mempertimbangkan peran institusi pendidikan Kristen dan prinsip-prinsip handal dalam menciptakan lingkungan inklusif. Tujuan utama diskursus adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Institusi pendidikan Kristen juga harus berkontribusi dengan prinsip-prinsip agama untuk membuat lingkungan pendidikan yang inklusif dan

berkualitas. Penting bagi setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan. Terdapat beberapa faktor utama dan menjadi penghambat dalam kemerdekaan pendidikan, antara lain: komersialisasi pendidikan, kurangnya dana, rendahnya mutu sumber daya manusia, korupsi dan faktor ekonomi masyarakat. Diskursus ini menjadi wadah untuk mengembangkan ide dan solusi dalam mencapai kemerdekaan pendidikan. Untuk mencapai kemerdekaan pendidikan maka harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua personal, memastikan kualitas pendidikan merata dan adil (Lasino 2024). Temuan penelitian ini menjadi fokus diskusi dalam mencari solusi untuk kemerdekaan pendidikan dan mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan berkualitas.

### ***Komersialisai Pendidikan***

Komersialisasi pendidikan merujuk pada proses di mana pendidikan diarahkan untuk mencapai keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, sering kali dengan mengorbankan prinsip-prinsip

pendidikan yang mendasar seperti aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan atau kemerdekaan. Komersialisasi pendidikan meningkatkan biaya pendidikan yang tak terjangkau bagi banyak personal, memperdalam kesenjangan sosial. Ada kecenderungan bagi institusi tertentu menerima siswa dari latar belakang ekonomi kuat, mengabaikan yang kurang mampu. Penekanan pada keuntungan finansial dapat mengorbankan kualitas pendidikan, mengabaikan standar akademik dan pengembangan siswa. Hal ini mereduksi pendidikan menjadi serangkaian tes, tanpa fokus pada keterampilan dan karakter.

Komersialisasi juga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan siswa berada mendapat pendidikan berkualitas sementara yang kurang mampu terbatas aksesnya. Ancaman terhadap kemandirian budaya dan intelektual bangsa juga muncul, ketika kepentingan bisnis mempengaruhi kurikulum yang tak selalu sesuai dengan nilai lokal. Penanganan komersialisasi membutuhkan komitmen dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Regulasi ketat pada institusi swasta, investasi

dalam pendidikan publik, dan penegakan standar kualitas pendidikan diperlukan. Pemahaman masyarakat tentang dampak negatif komersialisasi dan advokasi untuk hak pendidikan yang merata dan berkualitas penting. Dengan tindakan ini, tantangan komersialisasi dapat diatasi, memastikan hak pendidikan setiap personal terpenuhi, terlepas dari status ekonomi.

### *Penyanggah Dana Edukasi*

Dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, penting untuk diingat bahwa sekolah tidak dapat beroperasi tanpa biaya. Namun, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penyanggah dana dalam konteks pendidikan. Meskipun sekolah tidak dapat benar-benar gratis, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa biaya tersebut tidak menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi bagi personal atau kelompok tertentu. Penyanggah dana pendidikan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi ekonomi personal. Sistem yang adil dan inklusif akan mempertimbangkan berbagai sumber dana, termasuk kontribusi

pemerintah, dana dari sektor swasta, dan partisipasi komunitas. Pendanaan yang kuat memastikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh personal, tanpa menghiraukan status ekonominya.

Ini menegaskan tekad untuk menciptakan peluang yang setara bagi semua anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa hambatan finansial yang tidak terjangkau. Sebagai tambahan, sektor swasta juga dapat menjadi penyanggah dana penting dalam pendidikan selain pemerintah. Melalui kemitraan dengan perusahaan, yayasan, atau personal, sekolah dapat memperoleh sumber daya finansial tambahan, seperti sumbangan, sponsor, atau program beasiswa. Namun, penting untuk mengatur keterlibatan sektor swasta dengan ketat untuk memastikan bahwa pendidikan tetap terlindungi dari kepentingan komersial yang merugikan.

Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pendanaan pendidikan. Melalui sistem yang inklusif, masyarakat lokal dapat berkontribusi dengan berbagai cara, seperti pembayaran

urusan sekolah, kegiatan penggalangan dana, atau penyediaan fasilitas dan sumber daya secara sukarela. Dalam kesimpulannya, penyandang dana pendidikan haruslah beragam dan seimbang, mencerminkan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua personal. Dengan sinergi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi bagi siapa pun yang berusaha mendapatkan akses ke pengetahuan dan pembelajaran.

#### ***Kurangnya SDM yang Berkualitas***

Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dalam konteks pendidikan seringkali menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh sekolah dan institusi pendidikan. Salah satu dampak langsung dari rendahnya sumber daya manusia adalah keterbatasan dalam hal keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan (Pantan 2023). Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan secara keseluruhan. Dalam situasi di mana gaji atau tunjangan yang diberikan

kepada pendidik dan tendik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka sering kali terpaksa mencari sumber penghasilan tambahan di luar profesi mengajar atau mendidik. Ini bisa berarti mereka harus mencari pekerjaan tambahan di luar jam kerja mereka di sekolah, atau bahkan berdagang atau bekerja paruh waktu di industri lain.

Terdapat konsekuensi serius dari situasi ini, dimana pembagian perhatian pendidik dan tenaga kependidikan antara pekerjaan tambahan dan tugas sekolah dapat mengganggu kualitas pengajaran dan pembelajaran (Suhartono, Gultom, and Widiada 2023). Mereka mengalami kelelahan, kurang waktu untuk menyiapkan materi, memberikan perhatian personal kepada siswa, atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler (Pantan 2016). Rendahnya sumber daya manusia juga membatasi inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan profesional dapat menghalangi peningkatan keterampilan dan penerapan praktik terbaik dalam pengajaran (Indriyani, Saefulloh, and

Riono 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peningkatan gaji, pelatihan profesional, dan pembangunan sistem pendidikan yang inklusif. Dengan langkah ini, lingkungan yang memotivasi dan memadai untuk semua pihak dapat dibentuk, sehingga mampu memberikan edukasi berkualitas serta membawa kemajuan bagi masa mendatang.

### ***Maraknya Korupsi***

Maraknya korupsi merupakan hambatan serius dalam menciptakan kesetaraan atau kemerdekaan dalam pendidikan. Praktik suap dan korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan personal dan lembaga yang terlibat, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Korupsi dalam konteks pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap untuk memperoleh tempat di sekolah atau universitas yang bergengsi, mulai dari penggunaan yang tidak tepat hingga penyalahgunaan dana pendidikan untuk kepentingan

personal atau kelompok tertentu (Anwar Abidin 2017, 88). Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Personal yang memiliki kekayaan, semakin besar kekuasaan dan semakin besar pula akses yang dimiliki, sementara mereka yang kurang mampu terpinggirkan (Pakpahan and Pantan 2022).

Praktik korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ketika proses seleksi dan penilaian tidak adil karena dipengaruhi suap dan nepotisme, dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Menjadi salah satu faktor menghambat upaya menciptakan kesetaraan atau kemerdekaan dalam akses pendidikan. Selain itu, korupsi juga berdampak buruk pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Apabila anggaran pendidikan disalahgunakan atau tidak dialokasikan dengan tepat, dapat mengurangi kapasitas sekolah dan institusi pendidikan untuk menyediakan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan. Akibatnya, siswa tidak mendapat akses

pendidikan berkualitas. Mereka kehilangan kesempatan untuk mencapai kesuksesan di masa depan.

Guna mengatasi maraknya korupsi dalam pendidikan, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif. Ini termasuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Melakukan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang etika serta integritas pada kalangan pendidik, siswa maupun masyarakat secara umum. Hanya melalui kolaborasi dalam memberantas korupsi dalam sektor pendidikan, dapat membentuk lingkungan yang berkeadilan dan semua orang mempunyai peluang tanpa perbedaan dalam memperoleh pendidikan berkualitas dan meraih potensi mereka secara penuh.

### ***Faktor Ekonomi Masyarakat***

Faktor ekonomi masyarakat menjadi salah satu penghalang utama dalam menciptakan kesetaraan atau kemerdekaan dalam pendidikan. Kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat menyebabkan banyak personal dan keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan

dasar mereka, termasuk biaya pendidikan. Dampak dari kondisi ekonomi yang sulit ini menciptakan berbagai tantangan yang menghambat akses dan partisipasi dalam pendidikan. Pertama-tama, kemiskinan dapat mengakibatkan terbatasnya akses fisik terhadap Pendidikan (Sumual et al. 2021).

Banyak keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi biaya pendidikan atau transportasi, sehingga anak mereka terhalang dari kesempatan untuk menghadiri sekolah secara teratur atau bahkan mengakses pendidikan formal sama sekali. Selain itu, tekanan ekonomi juga dapat mengarah pada prioritas yang berbeda dalam keluarga. Ketika keluarga berjuang untuk bertahan hidup, pendidikan sering kali menjadi pilihan kedua setelah mencari pekerjaan atau mencari nafkah tambahan. Anak-anak dipaksa untuk bekerja atau membantu mengurus anggota keluarga lainnya, yang mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk pendidikan.

Faktor kesulitan ekonomi juga dapat menciptakan sikap yang kurang peduli terhadap pendidikan. Ketika orang tua dan keluarga merasa putus

asa atau terlilit hutang, mereka cenderung melihat pendidikan dengan sebelah mata atau dianggap tidak menjamin masa depan yang lebih cerah. Hal ini dapat mengurangi motivasi untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Hanya melalui penanganan komprehensif terhadap masalah ekonomi masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki peluang yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan mencapai kesuksesan dalam hidup.

### **Kemerdekaan Pendidikan: Refleksi dalam Institusi Pendidikan Kristen**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kemerdekaan pendidikan tanpa diskriminasi. Institusi pendidikan Kristen, melalui refleksi yang mendalam, berupaya menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata. Kemudian mengevaluasi nilai-nilai kekristenan dan mengidentifikasi hambatan dalam mencapai kemerdekaan pendidikan. Meskipun demikian, masih ada ketimpangan dalam akses

pendidikan antara kelompok miskin dan kaya (Sumual et al. 2021). Realitasnya adalah terjadi segregasi dalam sistem pendidikan, menyebabkan kesenjangan yang signifikan. Namun, jika diberikan kesempatan yang sama, maka anak dari latar belakang ekonomi yang berbeda memiliki potensi yang sama untuk berhasil dalam pendidikan. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan alternatif. Persoalan dalam kemerdekaan pendidikan sangat kompleks dan harus diatasi secara serius serta memerlukan langkah-langkah strategis. Membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, gereja, lembaga pendidikan dan masyarakat.

### ***Membantu Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan***

Institusi pendidikan Kristen dalam penyelenggaraannya tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah. Pemerintah mengatur regulasi seluruh pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sekalipun bukan sentralistik lagi. Keduabelah pihak harus bersinergi

dan memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah memegang peran sentral dalam menegakkan kemerdekaan pendidikan bagi semua warga Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan pondasi krusial dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Tindakan awal yang perlu dilakukan yaitu memastikan kesempatan yang sama untuk seluruh orang, tanpa melihat kondisi ekonomi, geografis dan sosial masyarakat. Tindakan ini bisa dilakukan melalui kebijakan dan program yang mendukung akses pendidikan gratis atau terjangkau, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang mencakup wilayah-wilayah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pemerintah mempunyai andil besar untuk meningkatkan mutu edukasi. Mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kualifikasi pendidik, dan penyediaan sumber daya pembelajaran yang memadai

termasuk mempersiapkan regulasinya. Karena alasan inilah, maka institusi pendidikan Kristen harus membantu pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah bersama-sama dengan pengelola institusi pendidikan memberikan pelatihan untuk pendidik dan promosi inovasi pembelajaran. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan Kristen bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Keduanya menerapkan kebijakan anti-diskriminasi dan mendukung inklusi pendidikan. Pemerintah harus melawan praktik yang menghambat kesetaraan, seperti korupsi dan diskriminasi. Pemerintah perlu menggalang dukungan dari sektor swasta, lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas program pendidikan. Dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan institusi pendidikan Kristen, maka pemerintah dapat memastikan akses dan kontribusi yang merata dalam mencapai kemerdekaan pendidikan. Langkah-langkah ini, memberi kepastian bagi semua orang di Indonesia dapat mempunyai kesempatan yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang baik.

### ***Sokongan Gereja bagi Institusi Pendidikan Kristen***

Gereja memiliki potensi besar dalam mewujudkan kemerdekaan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gereja, memiliki jangkauan luas dan pengaruh yang kuat di tengah masyarakat, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam usaha untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata dan berkualitas (Marbun 2016, 149). Gereja dapat menjadi penyokong bagi perjuangan kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Karena, gereja memiliki jaringan yang luas di banyak daerah, termasuk di lokasi terpencil dan terpinggirkan. Karena itu, gereja dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan program-program pendidikan kepada masyarakat yang sulit dijangkau oleh lembaga lain. Melalui kehadiran gereja di tingkat lokal, informasi tentang pentingnya pendidikan dan kesempatan untuk memperolehnya dapat disampaikan secara langsung kepada jemaat dan masyarakat sekitarnya. Hal ini juga memerlukan

andil dari para pemimpin gereja-gereja lokal.

Kemudian, gereja memiliki kekuatan moral dan spiritual untuk mempromosikan nilai-nilai pendidikan dalam masyarakat. Pesan-pesan penting tentang pendidikan dapat disampaikan melalui khotbah dan program-program spiritual, mengubah sikap dan motivasi masyarakat. Gereja juga dapat memberikan dukungan praktis seperti beasiswa dan bantuan biaya sekolah bagi keluarga kurang mampu. Sebagai mitra pemerintah dan lembaga pendidikan, gereja dapat membantu mencapai kemerdekaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan gereja, setiap personal diberikan peluang yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Melalui kerjasama yang baik dengan pemerintah dan lembaga pendidikan, gereja dapat mengatasi tantangan kesempatan pendidikan dan membentuk masa depan yang cerah.

### ***Penguatan Institusi Pendidikan Kristen***

Penguatan lembaga penyelenggara pendidikan dalam bidang usaha

menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemerdekaan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Institusi pendidikan Kristen yang memiliki sumber daya yang kuat adalah institusi yang lebih mungkin untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi masyarakat. Perlu dipahami, lembaga-lembaga pendidikan memegang peran sentral dalam menyediakan layanan pendidikan kepada berbagai segmen masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Untuk memberikan layanan pendidikan pada berbagai segmen tersebut tentu membutuhkan sumber daya yang besar. Peningkatan kekuatan institusi pendidikan menjadi wahana membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses. Hal ini berdampak positif dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok ekonomi yang berbeda.

Pengelola institusi pendidikan Kristen memiliki peran besar dalam memperluas area pilihan pendidikan bagi masyarakat. Penguatan institusi

pendidikan melalui dukungan pendidik dan investasi infrastruktur memastikan bahwa layanan pendidikan berkualitas. Penguatan institusi mencakup seluruh bidang ataupun elemen-elemen terkait dalam lembaga pendidikan. Walaupun lembaga pendidikan Kristen harus tetap beroperasi dengan prinsip moral, etika, dan mematuhi standar pemerintah. Regulasi ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kontribusi positif lembaga pendidikan dalam mencapai kemerdekaan pendidikan. Peningkatan kapasitas atau penguatan institusi pendidikan Kristen dapat memperluas cakupan pendidikan yang inklusif dan beragam, memberikan peluang setara bagi semua personal untuk pendidikan berkualitas sebagai langkah cerdas membentuk masa depan masyarakat Indonesia.

### ***Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat***

Faktor ekonomi merupakan bagian penting dalam mencapai kemerdekaan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Artinya, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memainkan

peran kunci dalam mewujudkan kemerdekaan pendidikan bagi semua warga Indonesia. (Sugiharto 2021, 108) Ketika masyarakat dapat mengakses lebih banyak sumber daya ekonomi, maka mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi diri mereka sendiri serta anggota keluarga, serta berperan aktif dalam mendukung inisiatif pendidikan di komunitas mereka. Salah satu komponen penting dari pemberdayaan ekonomi adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.

Melalui program pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi, masyarakat dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, membuka peluang kerja, dan stabilitas pendapatan, mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan. Pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM, menciptakan lapangan kerja baru dan pendapatan lokal, membiayai pendidikan atau memberikan dukungan finansial. Ini menciptakan lingkungan mendukung

bagi pendidikan, mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan motivasi untuk mendukungnya. Ini mendorong anak-anak untuk bersekolah dan mencapai pendidikan berkualitas. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan personal, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kemerdekaan Pendidikan (Latif 2021, 393). Langkah-langkah ini mendukung akses dan kualitas pendidikan, memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

### ***Peningkatan Kemampuan Entrepreneuership bagi Pendidik***

Peningkatan kemampuan wirausaha bagi pendidik menjadi kunci sukses untuk membuka pintu masuk bagi terwujudnya kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Kemampuan wirausaha tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan bidang kewirausahaan. Melalui kemampuan tersebut, maka pendidik dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan tidak bergantung sepenuhnya pada institusi (Junifrius Gultom 2023, 63). Oleh karena itu, kebutuhan

pendidik di lingkungan institusi pendidikan Kristen harus benar-benar terpenuhi. Jika tidak, maka sulit untuk mewujudkan kemerdekaan dalam pendidikan. Perlu dipahami, kemerdekaan pendidikan pada hakikatnya adalah segmen pelayanan sosial dan pengabdian. Sehingga, kemampuan pendidik melepaskan diri dari ketergantungan penghasilan institusi, memastikan bahwa mereka mampu berkontribusi maksimal dalam mengabdikan diri.

Peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan ekonomi (Nuraini Purwandari dan Achmad 2022, 28). Dengan meningkatkan keterampilan berusaha, maka dapat mendukung siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam untuk meraih kesuksesan (Sugiono 2008). Peningkatan kapasitas pendidik dalam ilmu kewirausahaan tidak hanya terbatas pada peningkatan pendidikan personal, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan (Riska Oktafiana, Fathiyani 2020). Dengan langkah-langkah ini, maka institusi pendidikan Kristen secara reflektif mampu

membuat atmosfer merata dan semua personal mempunyai peluang yang sama dalam berkembang serta berkontribusi pada pembangunan negara.

### ***Menyelenggarakan Pendidikan Alternatif***

Institusi pendidikan Kristen dapat menyelenggarakan pendidikan alternatif sebagai langkah untuk kesetaraan pendidikan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan alternatif menjadi suatu kebutuhan esensial dalam menjalankan upaya untuk mewujudkan kemerdekaan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Misalnya, pendidikan alternative pada kalangan Islam (Ahmad Bahrudin 2007, 6). Pendidikan alternatif menawarkan solusi yang fleksibel dan inklusif, mekan personal dari beragam latar belakang untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa terhalang oleh batasan geografis, ekonomi, atau sosial. Pendidikan alternatif menawarkan solusi bagi personal yang sulit mengakses pendidikan formal, seperti akibat keterbatasan geografis atau ekonomi. Melalui opsi pembelajaran fleksibel seperti pembelajaran jarak jauh atau

program berbasis proyek, pendidikan alternatif memenuhi kebutuhan beragam personal (Benyamin, Sinaga, and Gracia 2021). Misalnya, program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus atau fokus pada pengembangan keterampilan tertentu.

Institusi pendidikan Kristen dapat meniru pendidikan alternative dalam institusi pendidikan Islam, seperti Majelis Taklim (Jadidah 2016, 28). Melalui perluasan cakupan pendidikan, pendidikan alternatif mendorong inklusi dan keberagaman, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ini mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap personal untuk tumbuh dan berkembang. Penting untuk diingat bahwa pendidikan alternatif bukanlah pengganti pendidikan formal, melainkan merupakan pelengkap yang penting dalam upaya mencapai kemerdekaan pendidikan. Oleh karena itu, dukungan dan pengakuan yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan alternatif dapat memberikan kontribusi maksimal

dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan pendidikan bagi semua personal di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan mencapai impian mereka. Jika ada poin khusus atau detail yang ingin dijelaskan yang merupakan bagian dari Hasil Temuan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Institusi Pendidikan Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan tersebut. Tantangan utama meliputi biaya pendidikan yang tinggi bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, ketidakmerataan akses pendidikan, isu keberagaman, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi dengan pemerintah serta entitas lainnya. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan Kristen tetap berjuang untuk memastikan akses pendidikan

yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, institusi pendidikan Kristen tidak hanya berperan sebagai pilar kemerdekaan pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua personal di Indonesia. Institusi pendidikan Kristen sebagai agen perubahan memerlukan kerjasama dengan pemerintah, gereja dan masyarakat untuk mengatasi tantangan pendidikan dan rendahnya sumber daya. Melalui dukungan dari berbagai pihak, maka kemerdekaan pendidikan bisa direalisasikan, memastikan bahwa semua personal memiliki peluang untuk mengakses pendidikan berkualitas. Penulis menyarankan agar para peneliti melakukan penelitian tambahan untuk menyoroti peran dan langkah-langkah konkrit institusi pendidikan Kristen untuk mewujudkan kemerdekaan pendidikan yang sesungguhnya.

## REFERENSI

- Ahmad Bahrudin. 2007. *Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Angga, Angga, Yunus Abidin, dan Sofyan Iskandar. 2022. "Penerapan Pendidikan Karakter dengan Model Pembelajaran Berbasis Keterampilan Abad 21." *Jurnal Basicedu* 6, no. 1: 1046–54.
- Anwar Abidin, Achmad. 2017. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya)." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1: 87–99.  
<https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>.
- Benyamin, Priskila Issak, Ucok P Sinaga, dan Febie Yolla Gracia. 2021. "Penggunaan 'Platform' Digital Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di Era Disrupsi." *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1: 60–68.
- Darmaningtyas, Ki. 2022. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: Buku Bijak.
- Effendy, Rustan. 2014. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah* 07, no. 2: 142–65.
- Fellang, Iskandar. 2022. "Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan" 3, no. April: 13–26.
- Fironika K, Rida. 2015. "Pembiayaan Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 2, no. 1: 43–64.
- Indriyani, Azizah, Muhammad Saefulloh, dan Slamet Bambang Riono. 2020. "Pengaruh Diklat Kependidikan dan Kesejahteraan Guru terhadap Kualitas Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon." *Syntax Idea* 2, no. 7: 176–93.  
<https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>.
- Jadidah, Amatul; Mufarrohah. 2016.

- “Paradigma Pendidikan Alternatif: Majelis Taklim Sebagai Wadah Pendidikan Masyarakat.” *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1: 28–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/ps.v4i1.48>.
- Junifrius Gultom. 2023. “Reward-Penalty System Sebagai Implementasi Pengembangan Profesionalisme dalam Lingkungan Kerja Kegerejaan.” Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kristia Trikurnianto Pandu, Aminuyati, Thomy Astra Atmaja. 2022. “Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau” 13, no. 2: 543–50.
- Lasino, Lasino. 2024. “Pendidikan Agama Kristen Deliberatif sebagai Implementasi Pendidikan yang Membebaskan: Kajian tentang Student Centered Learning.” *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 10, no. 1: 66–76.
- Latif, Yudi. 2021. *Pendidikan Yang Berkebudayaan Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: Gramedia.
- Marbun, Japarlin. 2016. “Peranan Gereja bagi Pendidikan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen* I: 141–62.
- Maulana, A. 2022. “Pancasila Sebagai Budaya Bangsa dalam Pendidikan Nasional,” 1–6.
- Nuraini Purwandari dan Achmad. 2022. “Penerapan Technopreneur Dasar bagi Guru-Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Cikarang.” *KALBISCIENTIA Jurnal Sains Dan Teknologi* 9, no. 1: 28–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.53008/kalbiscientia.v9i1.216>.
- Pakpahan, Gernaida Krisna R., dan Frans Pantan. 2022. “Konstruksi Teologis Integritas Kristendi Era Masyarakat 5.0.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1: 174–82.
- Pantan, Frans. 2016. “Metafisika Pendidikan Iman di Gereja.” *Diegesis: Jurnal Teologi* 1, no. 1.
- . 2023. “Chatgpt dan Artificial Intelligence: Kekacauan atau Kebangunan Bagi Pendidikan Agama Kristen di Era Postmodern.” *Diegesis: Jurnal Teologi* 8, no. 1: 108–20. <https://doi.org/10.46933/dgs.vol8i1108-120>.
- Pantan, Frans, Hendrik Timadius, Gernaida K. R. Pakpahan, dan Heru Cahyono. 2021. “Prinsip Didaktik Pentakostal: Ekstraksi Teologis dan Pedagogis dari Paulo Freire.” *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2: 122–33. <http://christianeducation.id-e-journal/index.php/regulafidei/article/view/120>.
- Riska Oktafiana, Fathiyani, Musdalifah. 2020. “Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Mappesona* 3, no. 1: 26–31. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.
- Rustiawan, Hafid. 2021. “Komersialisai Pendidikan (Analisis Pembiayaan Pendidikan).” *Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 16, no. 1: 44–63.
- Safarah, Azizah Arifinna, and Udik Budi Wibowo. 2018. “Program

- Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia.” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 21, no. 2: 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>.
- Sugiharto, Vebri. 2021. “Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Umat Islam (Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Mandailing Natal).” *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1: 108–26. <https://doi.org/https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/854>.
- Sugiono, Sadrakh. 2008. “PAK Dan Penginjilan dalam Amanat Agung Yesus Kristus.” *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1: 1–16.
- Suhartono, Tony, Junifrius Gultom, and Gede Widiada. 2023. “Menyatukan Integritas Pemimpin dan Kedewasaan Rohani: Studi tentang Internalisasi Buah Roh dalam Komunitas Gereja.” *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 13, no. 1: 1–19.
- Sumual, Ivonne Sandra, Anggi Maringan Hasiholan, Aldi Abdillah, Naftali Untung, and Amos Hosea. 2021. “Gagasan Teologi Konstruktif Asia Bagi Model Pendidikan Agama Kristen dalam Mengentaskan Isu Kemiskinan di Indonesia.” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 2.
- Wahyaningsih, Sri. 2018. *Oase Pendidikan di Indonesia Kisah Inspiratif Para Pendidik*. Jakarta: Tanoto Foundation.
- Wijadno, Serian. 2018. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dan Mutu Lulusan*. Jakarta: Salemba Empat.